

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN KEPEMILIKAN
MAYORITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2011-2013)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi

Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

ERLANG ANUGRAHENDRA PURWANGGONO

NIM. 12030110130180

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Erlang Anugrahendra Purwanggono

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110130180

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN KEPEMILIKAN MAYORITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr.H.Abdul Rohman,SE,M.Si., Akt.

Semarang, 23 Maret 2015

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr.H.Abdul Rohman,SE, M.Si., Akt.

NIP. 196601081992021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Nama : Erlang Anugrahendra Purwanggono

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110130180

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN KEPEMILIKAN MAYORITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr.H.Abdul Rohman,SE,M.Si, Akt.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 23 Maret 2015

Tim Penguji :

1. Prof. Dr.H.Abdul Rohman,SE,M.Si., Akt. (.....)

2. Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt. (.....)

3. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Erlang A. Purwanggono, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN KEPEMILIKAN MAYORITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 23 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

Erlang Anugrahendra Purwanggono

NIM. 12030110130180

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, nescaya Dia menjadikan baginya jalan keluar (2). Dan memberi rezeki kepadanya tanpa di duga, dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, nescaya Dia akan mencukupkannya, sesungguhnya Allah melaksana urusan yang dikehendakiNya, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu (3). (Surah At-Thalaq: 2 -3)

The Ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do. (Steve Jobs)

You have to fight to reach your dream. You have to sacrifice and work hard for it. (Lionel Messi)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT, Keluargaku, dan semua temanku

Terima kasih atas segala kebaikannya.

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine Corporate Social Responsibility and Majority Firm to Tax Aggressiveness. This study is a developing of a previous study, Lanis and Richardson (2011). The difference between this and previous studies is the use of samples and test equipment at research previous studies using a CSR method from Australia, measuring a Majority Firm with previous study from previous study in Indonesia. Whereas this study uses SPSS test equipment 21

The populations used in this study are manufacturing company listed in the Indonesian Stock Exchange from year 2011-2013. Sampling technique in this study using purposive sampling method. Data analysis techniques performed by hypothesis testing using multiple linear regression method.

The results of this study indicate that Corporate Social Responsibility negative significantly influence Tax Aggressiveness. Whereas, Family Firm also have a negative significant effect on the Tax Aggressiveness.

Keywords: *corporate social responsibility, majority firm, tax aggressiveness.*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Pada penelitian kali ini mencoba menguji apakah pengungkapan tanggung jawab sosial dan kepemilikan mayoritas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan mengenai fakta empiris atas pengaruh faktor fundamental yang dijelaskan melalui 3 variabel. Untuk memperoleh hasil yang valid maka terdapat 2 variabel independen berupa tanggung jawab sosial perusahaan dan kepemilikan mayoritas, dan 1 variabel dependen agresivitas pajak.

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2013. Sampel diseleksi menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab sosial perusahaan dan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: tanggung jawab sosial perusahaan, kepemilikan mayoritas, agresivitas pajak.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta keberuntungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Dr. Suharnomo, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro..

4. Prof. Dr. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, memberikan motivasi dan nasehat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
5. Daljono, S.E., M.Si., Akt, selaku dosen wali yang senantiasa memberikan nasehat serta motivasi.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan Universitas Diponegoro atas segala bantuan selama penulis menempuh kuliah.
7. Segenap keluarga besar Purwanggono, kedua orang tua penulis yaitu Bapak Bambang Purwanggono dan Ibu Dewi Hendrawati, Nenek penulis yaitu Eyang Moerdiningroem, Ketiga kakak penulis yaitu Aditya Hendra Purwanggono, Brillian Hendra Purwanggono dan Cahya Hendra Purwanggono, kakak ipar penulis yaitu Vita Yulianti dan Keponakan penulis yang sangat tersayang yaitu Azka Tafta Pratama, yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi yang diberikan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
8. Ucapan spesial penulis persembahkan untuk Andhika Yudha Pramuditya dan Norman Alvi, selaku teman kuliah yang membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, memberi dorongan yang tidak ada hentinya.

9. Terima kasih penulis ucapkan kepada Saella Fitriana, sahabat terbaik yang penulis miliki, yang selalu memberikan semangat dan dorongan motivasi ketika penulis dalam keadaan sedang jatuh maupun bangun. Terima kasih banyak ya.
10. Teman-teman perkuliahan di Akuntansi Undip yang bersama-sama berjuang sampai akhir, yang memberikan penulis semangat tiada henti, yang berjuang bersama di dalam maupun luar kampus untuk menggapai cita-cita masing-masing, menyelesaikan perkuliahan sampai titik darah penghabisan yaitu Habibi, Vira Fortuna, Evan Luthf, Rinobel, Silvia Syarifah, Ryan Bayukresna, Muhammad Rifai, Nikho Averus, Febriyanto Ary, Marhaendra terima kasih telah bersama berjuang hingga akhir.
11. Seluruh teman Akuntansi Undip 2010, yang beberapa diantaranya membantu penulis menjalani kuliah, membantu penulis untuk melalui masa-masa sulit berjuang dalam perkuliahan dan menyelesaikan skripsi yaitu, Rika Woning, Safira Pramesti, Renaldo Surya, Rizkita Amalinda, Nurani Prasetianti, Irwan Syah, Jodi Setya, Andhika Rahadian, Ferandi Prasetio, Maria Bonita, Vina Nugrahanti, Theresiana Anggraeni, Athur Tedo, Bangkit Sasongko, Fauzia Tresnasari, Dinar Prasetya dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah membantu penulis selama masa kuliah, sukses untuk kalian semua!
12. Sahabat terbaik seperti keluarga saya sendiri yang setiap waktu ada dikala apapun menerima saya di waktu yang bagaimanapun, lebih dari sekedar teman semasa kuliah yaitu Arvina Arief, Yulintang Kurniawan, Ridho

Widi, Fauziah Lina, Hisyam, Indri Hardiani, Anitya, Alto Pratapa, Fian, Andi Rachmanda terima kasih telah memberi masa-masa indah di masa perkuliahan.

13. Keluarga besar Abankirenk Semarang, baik mantan karyawan atau yang masih bekerja disana, terimakasih untuk proses pembelajaran dan kebersamaan yang memberikan cerita dan sebuah silaturahmi yang awet yaitu Aditya Reza, Erick Kusuma, Baswara Adit, Dafiq Wildan, Alfredo, Bayu Nugroho, Reynaldi Sinarta, Lukman M Rully, Amri Ghifari, Fatwa Abadi, Abidin, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
14. Sahabat sedari SMA, teman-teman SMA Negeri 1 Semarang angkatan 2010 yang masih menjalin silaturahmi secara baik yang masih saling berkabar dan bermain bersama, terima kasih penulis sampaikan pada Nielsen Manurung, Diondi Eliezer, Firdaus Aldise, Alfeus Gantari, Chandra Widi, Andree Weinard, Ichsan Toga, Laurensius Ivander, Sebastian Reno, Yohand Maladzi, Bitinia, Sarri Harmonita, Adieka, Bryan Akbar, Ponco Rainskian, Renis Susani, Agustinus Afridhas, Anindya Kusuma Putri, Amrulla Reza, Arsyad, Sessa Ganesha, Wahyu Rizki, Dea Murty, Kunandio Nugrahandana, Arya Destra, Robertus Febrian dan teman-teman yang lain kalian luar biasa!
15. Terima kasih Perpustakaan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro dan Starbucks Coffee dalam sumbangsih memberikan

kenyamanan dalam mengetik skripsi dan kepada barista yang selalu menjadi idola sampai kapanpun.

16. Teman-teman KKN di desa Timbang kecamatan Banyuputih, Batang :Mashyur, Anindita, Kamil, Dandy, Permana, Bakor, Icha, Indra, Rizky Setyaningrum, Rizky Iriawan, Umi. Terimakasih atas semuanya, Saya belajar banyak bersama dengan kalian berpuluh-puluh hari dan silaturahmi itu.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan dukungan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai input bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Maret 2015

Erlang Anugrahendra Purwanggono

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| PENGESAHAN KELULUSAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRACT | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |

| | |
|---|-----------|
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 13 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 14 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 14 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | 17 |
| 2.1 Landasan Teori | 17 |
| 2.1.1 Teori Legitimasi | 17 |
| 2.1.2 Teori Stakeholder | 20 |
| 2.1.3 Teori Agensi | 21 |
| 2.2 <i>Corporate Social Responsibility</i> | 22 |
| 2.3 <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> | 26 |
| 2.4 Kepemilikan Mayoritas | 28 |
| 2.5 Agresivitas Pajak..... | 30 |
| 2.6 Variabel Kontrol..... | 32 |
| 2.6.1 Profitabilitas | 32 |
| 2.6.2 Leverage | 32 |
| 2.6.1 Ukuran Perusahaan..... | 33 |
| 2.6.2 <i>Market to Book Ratio</i> | 33 |
| 2.7 Penelitian Terdahulu | 34 |

| | |
|--|-----------|
| 2.8 Kerangka Pemikiran..... | 40 |
| 2.9 Pengembangan Hipotesis | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 49 |
| 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional | 49 |
| 3.1.1 Variabel Dependen | 49 |
| 3.1.2 Variabel Independen | 50 |
| 3.1.3 Variabel Kontrol..... | 52 |
| 3.2 Populasi dan Sampel | 54 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 55 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data..... | 56 |
| 3.5 Metode Analisis Data..... | 56 |
| 3.5.1 Statistik Deskriptif..... | 56 |
| 3.5.2 Uji Asumsi Klasik | 57 |
| 3.5.3 Pengujian Hipotesis | 60 |
| BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... | 65 |
| 4.1 Deskripsi Variabel..... | 65 |
| 4.2 Hasil Analisis | 71 |
| 4.2.1 Screening Data..... | 71 |
| 4.2.2 Uji Asumsi Klasik | 73 |
| 4.2.3 Analisis Regresi..... | 80 |
| 4.3 Pembahasan..... | 88 |
| 4.3.1 Pengaruh CSR terhadap ETR | 88 |

| | |
|--|------------|
| 4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Mayoritas terhadap ETR..... | 90 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 93 |
| 5.1 Kesimpulan | 93 |
| 5.2 Saran..... | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN..... | 102 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 37 |
| Tabel 4.1 Perincian Sampel | 65 |
| Tabel 4.2 Statistik Deskriptif | 66 |
| Tabel 4.3 Identifikasi Outlier | 71 |
| Tabel 4.4 Identifikasi Outlier Kedua..... | 72 |
| Tabel 4.5 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov..... | 75 |
| Tabel 4.6 Pengujian Multikolinieritas..... | 76 |
| Tabel 4.7 Pengujian Autokorelasi Durbin-Watson | 77 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Glejser | 79 |
| Tabel 4.9 Hasil Regresi | 80 |
| Tabel 4.10 Uji Model (Uji F) | 83 |
| Tabel 4.11 Koefisien Determinasi | 84 |
| Tabel 4.12 Ringkasan Pengujian Hipotesis..... | 87 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 41 |
| Gambar 4.1 Normal P-Plot..... | 74 |
| Gambar 4.2 Scatterplot..... | 78 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| LAMPIRAN A DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL..... | 102 |
| LAMPIRAN B INDEX PENGUNGKAPAN CSR SEMBIRING..... | 112 |
| LAMPIRAN C TABULASI DATA..... | 118 |
| LAMPIRAN D HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF | 136 |
| LAMPIRAN E IDENTIFIKASI OUTLIER..... | 137 |
| LAMPIRAN F HASIL UJI ASUMSI KLASIK | 138 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan hal yang fundamental dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia. Pajak yang berasal dari iuran wajib rakyat merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara dan digunakan untuk keperluan negara diatur secara perdata dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak diluncurkannya reformasi peraturan perpajakan pada tahun 1983, definisi pajak tidak pernah secara eksplisit dicantumkan dalam undang-undang pajak, baik itu UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU PBB maupun UU Bea Materai. Hal ini terus berlanjut sampai dengan diterbitkannya UU KUP tahun 2007, yakni UU nomor 28 tahun 2007 sebagai UU perubahan ketiga dari UU KUP tahun 1983. Dalam pasal 1 angka 1 UU KUP 2007, pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak di Indonesia di klasifikasikan dalam dua jenis jika ditinjau dari pemungutnya yaitu pajak yang dikelola langsung oleh negara yaitu pajak yang dipungut secara langsung oleh pemerintah melalui aparatnya yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai. Jenis yang kedua pajak yang

dikelola oleh daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik Pemerintah Daerah tingkat satu dan Pemerintah Daerah tingkat 2.

Pajak jika ditinjau dari cara pemungutannya, pajak di Indonesia juga diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu pajak langsung yaitu pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Pajak langsung ini terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Perseroan (PPs), Pajak Deviden, Pajak Kendaraan Bermotor (PBB) dan sebagainya. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang pemungutannya dapat dialihkan kepada orang lain, tidak harus dibebankan langsung kepada wajib pajak, yaitu Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, Pita Rokok, Pajak Tontonan, Pajak Restoran, Pajak Ekspor dan Pajak Impor.

Pajak di Indonesia, terutama di tahun 2013, telah memberikan pendapatan untuk negara cukup besar. Menurut data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2013 penerimaan negara dari sector pajak mencapai Rp. 1.072,1 Triliun atau 93,4%. Pendapatan negara dari sector pajak ini berasal dari dua sumber yaitu pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri realisasinya banyak berasal dari PPh Non-Migas sebesar Rp. 464,5 triliun dan berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 383,4 triliun. Sementara dari lima sector penerimaan pajak dalam negeri, PPh Migas dan Cukai yang tercatat perolehannya diatas target pemerintah. PPh Migas realisasinya

sebesar Rp. 88,7 Triliun atau 119,5%, sedangkan Cukai realisasinya sebesar Rp. 108,5 triliun atau 103,6%. Sedangkan dari pendapatan pajak sector perdagangan internasional, penerimaan bea cukai yang tercatat mencapai target pemerintah, yakni sebesar Rp. 31,6 triliun atau 102,4 persen. (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2013)

Perusahaan sebagai wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk membayar pajak bagi negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pajak bagi perusahaan sendiri dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam laporan laba-rugi di laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya. Sebuah perusahaan mempunyai kepentingan tersendiri, terutama perusahaan yang berorientasi pada laba, dimana perusahaan jenis ini mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba bagi perusahaan untuk meningkatkan kekayaan bagi perusahaan. Sedangkan Negara Indonesia mempunyai kepentingannya tersendiri yaitu memaksimalkan pendapatan negara atas pajak, yang mana kepentingan ini bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Pajak sendiri bagi perusahaan merupakan beban yang harus dibayar, karena pajak dapat mengurangi laba bersih yang didapat oleh perusahaan, dan perusahaan akan melakukan segala cara untuk mengefisiensikan pajak yang harus dibayarnya (Mangoting, 1999).

Mangoting (1999) menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan *Tax Planning* yang bertujuan untuk meminimalkan pajak terutang untuk memaksimalkan

laba perusahaan sebelum pajak yang optimal. Bagi mereka, pajak merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga perlu ada usaha-usaha dan strategi-strategi untuk mengurangi pajak tersebut. Sedangkan menurut Rahman (2012) *Tax Planning* adalah bagian dari fungsi manajemen pajak yang meliputi proses pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat diseleksi untuk menentukan jenis tindakan dan penghematan pajak yang akan dilakukan. Sementara Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa tindakan manajerial untuk meminimalkan pajak melalui tindakan agresivitas pajak menjadi fitur yang umum dari lanskap perusahaan di seluruh dunia. Namun demikian, agresivitas pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan.

Beberapa peneliti dan literature mendefinisikan agresivitas pajak dalam berbagai persepsi. Chen, Chen, Cheng, dan Shelvin (2008) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai “*downward management of taxable income through tax planning activities*”. Sementara Frank, Lynch, dan Rego (2009) dalam Balakhrisnan, Blouin, dan Guay (2012) menyatakan agresivitas pajak sebagai “*downward manipulation of taxable income through tax planning that may or may not be considered fraudulent tax evasion*”. Definisi dari berbagai peneliti ini menimbulkan pemahaman bahwa tindakan agresivitas dapat dilakukan melalui cara yang legal dan illegal.

Tindakan agresivitas pajak yang terbagi dalam dua cara yaitu legal dan illegal. Beberapa peneliti seperti Khurana dan Moser (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* atau *tax sheltering*.

Sedangkan Timothy (2010) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat dilakukan dengan cara legal dan illegal. Cara legal dalam tindakan agresivitas pajak yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku adalah *legal tax avoidance*, dan merupakan cara yang disahkan oleh akuntan. Menurut Barr (1977) dalam Masri dan Martani (2012) menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Kemudian cara yang kedua adalah *tax sheltering*. Sementara *tax sheltering* menurut Desai dan Dharmapala (2006) dalam Timothy (2010) didefinisikan sebagai upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Beberapa peneliti lain seperti Mangunsong (2002), Mangoting (2009), dan Harari, Sitbons, dan Donyets (2012) juga menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *tax avoidance* (legal) dan *tax evasion* (illegal).

Meskipun dalam prakteknya terdapat perbedaan dalam definisi tentang *tax planning* yang dilakukan baik secara legal maupun secara illegal menggunakan *tax sheltering* atau *tax evasion*, tetap saja perusahaan melakukan kegiatan yang melanggar undang-undang dengan melakukan suatu usaha untuk perencanaan pajaknya. Agresivitas pajak atau manajemen pajak juga dapat disimpulkan sebagai tindakan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan memperoleh laba dan likuiditas yang cukup (Mangoting, 1999). Aktivitas *tax planning* yang merupakan aktivitas untuk melakukan agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara legal (*tax avoidance*), secara illegal (*tax sheltering* dan *tax evasion*), dan dapat dilakukan

dengan kedua cara tersebut. Pratt, Burns, dan Kulsrud (1989) dalam Mangoting (1999) mendefinisikan tujuan *Tax Planning* sebagai *the obvious goal of tax planning is the minimization of the amount that a person or other entity must transfer to the government.*

Erle dan Schon (2008) dan Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung-jawab secara social atau disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Watson (2012) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat CSR yang rendah merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara social sehingga akan melakukan tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar social atau memiliki tingkat CSR yang lebih tinggi. Oleh karena pernyataan tersebut maka penelitian ini akan meneliti pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan.

Dalam konteks pembangunan saat ini, keberhasilan sebuah perusahaan bukan lagi diukur dari keuntungan bisnis semata, melainkan juga dilihat dari sejauh mana kepedulian perusahaan terhadap aspek social dan lingkungan atau yang disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sankat dan Clement K (2004) dalam Laksmono dan Suhardi (2011) menjelaskan CSR sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan, keluarganya,

komunitas local dan masyarakat secara lebih luas. Sementara menurut Patir dan Ziva (2002) dalam Laksmono dan Suhardi (2011) mendefinisikan CSR sebagai bagaimana *Corporate* besar berusaha memenuhi kebutuhan modal dari para pemegang saham, sementara di pihak lain dalam waktu yang bersamaan meningkatkan dampak positif pada masyarakat secara umum. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai factor kunci dalam keberhasilan dan kesuksesan perusahaan. Akan tetapi keterlibatan perusahaan dalam mengungkapkan CSR tidaklah wajib. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 66 ayat 2 yang menjelaskan bahwa Laporan Tahunan (*Annual Report*) perusahaan harus mengungkapkan tanggung jawab social perusahaan tersebut. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 dalam Pasal 15 (b) yang menyatakan bahwa “*Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab social perusahaan.*”

Pada hakikatnya CSR adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum, dikarenakan CSR menjadi pijakan komprehensif dalam aspek ekonomi, social kesejahteraan dan lingkungan. Bagaimanapun semua aspek dalam perusahaan, baik ekonomi, social, kesejahteraan dan lingkungan tidak bias lepas dari koridor tanggung jawab social perusahaan. Tanari (2009) dalam Laksmono dan Suhardi (2011) menjelaskan bahwa landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi meliputi: kinerja keuangan berjalan baik, investasi modal berjalan sehat, kepatuhan dalam pembayaran pajak, tidak terdapat praktik suap atau korupsi, tidak ada konflik kepentingan, tidak dalam keadaan mendukung rezim yang korupsi,

menghargai hak atas kemampuan intelektual atau paten, dan tidak melakukan sumbangan politis atau lobi. Dengan disebutkannya bahwa landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi meliputi kepatuhan dalam pembayaran pajak maka hubungan antara CSR dengan pembayaran pajak maka tindakan agresivitas pajak erat hubungannya dengan tindakan tanggung jawab social perusahaan itu sendiri.

Setiap perusahaan mempunyai tingkat kesadaran yang berbeda dalam menerapkan CSR di dalam perusahaan. Semakin perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi menerapkan CSR di dalam perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan taat dalam membayar pajak, sesuai dengan pernyataan Tanari (2009) bahwa CSR memiliki landasan ekonomi yang salah satunya adalah ketaatan dalam membayar pajak dan landasan tersebut dapat menjadi acuan dalam mengukur tingkat kesadaran perusahaan menerapkan CSR. Rusydi (2009) menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan prinsip CSR justru akan mengganggu *sustainability* dan *image* korporasi tersebut.

Perusahaan dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh mayoritas baik perorangan melalui perusahaan non public maupun keluarga juga berpengaruh pada tindakan agresivitas pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Selain itu mendirikan perusahaan yang dimiliki pemilik mayoritas akan menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Sifat dan tingkat konflik keagenan dapat menimbulkan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi (Sari dan Martani 2010). Saat kepemilikan dan manajemen terpisah, terjadilah proses kerja dan

pengawasan yang tidak sempurna, dan ini menimbulkan indikasi akan terjadinya tindakan agresivitas pajak.

Masalah keagenan dalam setiap perusahaan tidak selalu sama dan ini menimbulkan tingkat agresivitas pajak dalam perusahaan mayoritas dan non-mayoritas berbeda. Sari dan Martani (2010) menjelaskan bahwa perbandingan tingkat agresivitas pajak antara perusahaan dengan kepemilikan mayoritas baik perusahaan non public maupun keluarga dan non-keluarga bergantung pada besar efek manfaat dan biaya yang timbul ketika suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak terhadap pemilik perusahaan keluarga yaitu keluarga pendiri, atau efek yang diterima oleh manajer dalam perusahaan non-mayoritas.

Perusahaan non-mayoritas lebih mempunyai presentase lebih tinggi dalam melakukan tindakan agresivitas pajak dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan mayoritas baik dari perusahaan non public dan keluarga, hal ini terjadi karena pada perusahaan non-mayoritas akan lebih banyak timbul masalah keagenan (Chen et al , 2010). Pemisahan antara kepemilikan dan manajemen akan menimbulkan kesempatan bagi manajer untuk bersikap oportunitis dengan mementingkan kepentingan individu sehingga menimbulkan permasalahan dan tindakan agresivitas pajak (Desai dan Dharmapala, 2007).

Penelitian mengenai keterkaitan antara CSR dan agresivitas pajak telah banyak diteliti oleh para peneliti diantaranya Watson (2011) dan Lanis dan Richardson (2012). Sementara penelitian mengenai perusahaan keluarga dengan

agresivitas pajak juga telah dilakukan penelitian seperti Chen et al (2010), Martinez dan Ramalho (2014), dan Sari dan Martani (2010). Watson menguji hubungan antara CSR dan agresivitas pajak dimana pengukuran agresivitas pajak menggunakan proksi UTB (*Unrecognized Tax Benefit*). Hasil dari penelitian Watson tersebut menunjukkan bahwa CSR mempunyai efek mengurangi agresivitas pajak di suatu perusahaan. Sementara Lanis dan Richardson (2012) menguji hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak dengan menyusun sejumlah analisis empirik. Proksi yang digunakan dalam mengukur agresivitas pajak menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). Hasil regresi yang ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR oleh suatu perusahaan maka semakin rendah tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Berbagai penelitian yang lain juga menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka semakin rendah tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Sementara hasil penelitian mengenai kepemilikan keluarga dengan agresivitas pajak, Chen et al (2010) menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan mayoritas dari perusahaan non public maupun keluarga memiliki masalah keagenan yang lebih rendah dari perusahaan non-mayoritas sehingga tingkat resiko terjadinya tindakan agresivitas pajak pada perusahaan kepemilikan mayoritas lebih rendah. Sementara Martinez dan Ramalho (2014) yang meneliti mengenai proporsi kepemilikan keluarga dengan agresivitas pajak di Brazil, menggunakan sampel perusahaan Brazil yang terdaftar di BMF dan Bovespa dari tahun 2001-2012

menunjukkan bahwa perusahaan keluarga memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan non-keluarga di Brazil.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan kepemilikan mayoritas baik dari perusahaan non public maupun keluarga terhadap agresivitas pajak, karena terdapat hubungan yang kuat antara penerapan CSR suatu perusahaan dan proporsi kepemilikan perusahaan terhadap tindakan agresivitas pajak yang akan dilakukan perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa penerapan CSR terdapat aspek ekonomi dimana di dalam aspek tersebut dijelaskan bahwa ketaatan membayar pajak merupakan salah satu aspek penerapan CSR. Regulasi perpajakan di Indonesia yang selalu berubah dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan apakah penelitian ini akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) menggunakan sampel Wajib Pajak Badan yang Listing di Australia tahun 2008-2009. Sedangkan Yoehana (2013) menggunakan sampel Wajib Pajak Badan Manufaktur yang Listing di Indonesia selama periode 2010-2011. Sampel pada penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak Badan Manufaktur yang Listing di Indonesia selama periode 2011-2013..

Penelitian mengenai CSR dan kepemilikan mayoritas baik dari perusahaan non public dan keluarga dan hubungannya dengan agresivitas pajak belum banyak dilakukan di Indonesia sampai saat ini. Seperti kita ketahui bahwa pengungkapan

CSR sangat diperlukan oleh perusahaan selain agar perusahaan tetap *Going Concern*, pengungkapan tanggung jawab social perusahaan atau CSR telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 bahwa dalam laporan tahunan (*annual report*) sebuah perusahaan wajib terdapat laporan pengungkapan tanggung jawab social perusahaan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sementara proporsi kepemilikan suatu perusahaan akan melatar-belakangi akan timbulnya kegiatan agresivitas pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan, karena terkait dengan permasalahan keagenan yang memisahkan antara kepemilikan dan manajerial perusahaan

Atas latar belakang dan uraian tersebut, peneliti hendak melakukan penelitian yang mengkaitkan antara CSR dan kepemilikan mayoritas dengan tindakan agresivitas pajak, dimana penelitian ini lebih berfokus pada apakah perusahaan yang mempunyai tingkat CSR yang tinggi dan proporsi kepemilikan mayoritas yang tinggi akan melakukan tindakan agresivitas pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan yang mempunyai tingkat CSR lebih rendah dan pada perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan mayoritas lebih rendah atau perusahaan non-mayoritas. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011) dimana ini penelitian ini menambahkan variable independen yaitu kepemilikan mayoritas dengan alasan bahwa masih banyaknya perusahaan di Indonesia yang proporsi kepemilikannya secara besar dimiliki oleh pihak mayoritas seperti perusahaan non public dan keluarga. Atas latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengaruh**

Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

1.2 Rumusan Masalah

Kaidah dari CSR sendiri sebenarnya bukan hanya bertanggung-jawab secara social kepada masyarakat, tetapi juga pada Pemerintah. Setiap perusahaan mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pajak, dimana pajak merupakan pendapatan bagi pemerintah sedangkan banyak perusahaan yang menganggapnya sebagai beban yang mengurangi laba bersih sehingga banyak perusahaan yang melakukan tindakan meminimalisasi pajak salah satunya tindakan agresivitas pajak. Dan hal ini juga berpengaruh pada masalah keagenan pada perusahaan mayoritas karena tingginya tindakan oportunitis manajemen.

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak mencerminkan pertanggung-jawaban secara social karena kaidah dari *Corporate Social Responsibility* adalah bahwa perusahaan juga diwajibkan untuk taat dalam hal perpajakannya sebagai tanggung jawab kepada pemerintah. Masalah keagenan yang timbul karena pemisahan tanggung jawab di dalam perusahaan juga dapat memberikan peluang kepada manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dan dapat pula merugikan pemerintah sebagai pihak yang mendapat manfaat yang besar dari perpajakan. Karena hal tersebut dapat merugikan pemerintah, maka akan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat, karena pendapatan pemerintah dari

perpajakan akan dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab:

Apakah *Corporate Social Responsibility* dan Perusahaan dengan kepemilikan mayoritas baik perusahaan non public maupun keluarga berpengaruh pada tindakan agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan kepemilikan keluarga terhadap tindakan agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian tentang *Corporate Social Responsibility*, kepemilikan mayoritas dan Agresivitas Pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR lebih baik untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak, bagi investor diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai keadaan perusahaan melalui pengungkapan CSR dan tindakan perusahaan terhadap pihak pemerintah, dan bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan agresivitas pajak mengingat masih tingginya kegiatan agresivitas pajak di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat gambaran atas sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional penelitian, penentuan sampel penelitian, jenis dan

sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum hasil dan analisis penelitian, analisis hasil penelitian beserta pembahasannya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi merupakan teori yang banyak digunakan dalam bidang akuntansi social dan lingkungan (Tilling, 2004). Suchman (1995) dalam Tilling (2004) menyatakan:

“Legitimacy is generalized perception or assumption that the actions of entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.”

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memperhatikan lingkungan social sekitarnya dalam menjalankan usahanya agar tercipta hubungan yang baik antar keduanya (Wilmshurts dan Frost 2000; Patten 1992; Guthrie dan Parker 1989; Tinker dan Neimark 1987; Hogner 1982) dalam Chariri (2008). Perusahaan harus menyadari bahwa keberlangsungan hidup perusahaannya juga bergantung pada hubungan mereka dengan lingkungan sekitar. Suaryana (2011) menyatakan bahwa norma perusahaan akan selalu berubah mengikuti perkembangan sehingga dari waktu ke waktu akan terjadi perubahan. O’Donovan (2000) menyatakan legitimasi organisasi dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang dicari perusahaan dari masyarakat.

Perusahaan harus menyadari bahwa keberlangsungan suatu usaha sangat memerlukan kontrak social dengan masyarakat sekitar agar perusahaan mampu melaksanakan norma perusahaan yang sejalan dengan norma yang ada di masyarakat. Mekanisme *Corporate Social Responsibility* atau CSR adalah mekanisme yang dalam praktiknya bertanggung jawab terhadap masyarakat secara social. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice* dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, CA. 1994 dalam Titisari, Suwardi, dan Setiawan 2010). Deegan, Robin, dan Tobin (2002) dalam Fitriyani (2012) menyatakan bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*Congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan.

Dowling dan Preffer (1975) dalam Chariri (2008) menjelaskan bahwa terdapat dua aspek agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu: (1) aktivitas organisasi harus sesuai (*congruence*) dengan sistem nilai di masyarakat; (2) pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai social. Lindblom (1994) dalam Octaviana (2014) menyarankan bahwa suatu perusahaan dapat mengungkapkan CSR untuk memperlihatkan perhatian manajemen terhadap nilai-nilai masyarakat dari pengaruh negatif aktivitas perusahaan.

Beberapa peneliti telah melakukan studi akuntansi untuk menguji secara empiris hubungan antara pengungkapan CSR dengan perhatian masyarakat yang timbul dari perilaku perusahaan sesuai dengan teori legitimasi. Al-Naimi et al (2012) dalam Juhmani (2014) melakukan penelitian pada perusahaan di Qatar dan menemukan bahwa tingkat pengungkapan CSR masih rendah, begitu pula dengan Hossain et al (2006) dalam Juhmani (2014) memperoleh hasil penelitian yang sama rendahnya pada perusahaan yang berada di Bangladesh. Menurut Deegan et al (2002) bahwa secara keseluruhan berbagai tes teori legitimasi dalam literature akuntansi telah menghasilkan hasil yang tidak konsisten.

Hidayati dan Murni (2009) menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Untuk memperoleh legitimasi dari investor, perusahaan senantiasa meningkatkan return saham bagi investor. Untuk memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan meningkatkan kemampuannya mengembalikan hutang. Untuk memperoleh legitimasi dari konsumen, perusahaan senantiasa meningkatkan mutu produk dan layanan. Untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah, perusahaan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial. Teori Legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Cheers, 2011) dalam (Yoehana, 2013).

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* telah merubah pandangan manajemen bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi *Stakeholder*-nya. Hal ini bertolak-belakang pada teori keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan hanya sebatas pada pengelola (*agent*) dan pemilik (*principle*). Dengan demikian dukungan dari *Stakeholder* sebuah perusahaan berpengaruh pada keberadaaan sebuah perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Branco dan Rodrigues (2007) memberikan gagasan dasar bahwa terdapat pihak-pihak atau agen-agen yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan perusahaan selain pemegang saham. Jensen (2001) menjelaskan bahwa dalam teori *Stakeholder* manajemen perlu membuat keputusan yang mempertimbangkan kepentingan selain stakeholder, seperti karyawan, pelanggan, pejabat pemerintah. Stakeholder mengacu pada setiap individu atau kelompok yang mempertahankan kepentingannya di sebuah organisasi, sama seperti cara *shareholder* yang memiliki saham atau obligasi di perusahaan tersebut (Fassin, 2008).

Brenner dan Cochran (1991:452) dalam Donaldson dan Preston (1995) menjelaskan bahwa teori *Stakeholder* mempunyai dua tujuan utama, yaitu: (1) untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menjalankan operasinya; (2) untuk membantu memprediksi dari perilaku perusahaan tersebut. Teori *stakeholder* juga merubah pandangan manajemen yang seharusnya tidak hanya mempertimbangkan pemegang

saham dalam pengambilan keputusan tetapi juga siapa saja yang dipengaruhi oleh keputusan bisnis (Branco dan Rodrigues, 2007).

Teori *Stakeholder* dianggap sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari tindakan perusahaan (Yoehana,2013). Menurut Branco dan Rodrigues (2007) manajemen jangan hanya mempertimbangkan pada keputusan pemegang saham dalam melakukan keputusan bisnis melainkan juga harus mempertimbangkan pada siapa saja yang terkena dampak atas keputusan tersebut. Kaitan antara CSR dengan Teori *Stakeholder* adalah bahwa CSR yg dilakukan perusahaan akan lebih menarik konsumen dan pihak lain. Oleh karena itu, CSR harus dilakukan oleh perusahaan jika ingin meningkatkan minat dari konsumen (Cheers, 2011) dalam (Yoehana,2013).

2.1.3 Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang membahas hubungan antara *Principal* dan *Agent*. Pemilik perusahaan atau pemilik saham perusahaan merupakan *Principal* dan manajemen atau karyawan perusahaan merupakan *Agent*. Kim, Nofsinger dan Kohr (2010) dalam Hidayanti (2013) berpendapat bahwa pada umumnya terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan, pemisahan ini diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan bisnis perusahaan. Adanya pemisahan tersebut, tentu akan menimbulkan resiko, yaitu adanya konflik antara pemilik perusahaan dengan manajemen dan hal ini disebut juga dengan *Agency Conflict*.

Agency Conflict dapat berupa adanya tindakan individualism antara kedua pihak, untuk saling menguntungkan dirinya sendiri dan menomorduakan kepentingan perusahaan. Pemilik perusahaan sebagai *Principal* akan lebih focus pada peningkatan nilai saham perusahaan sedangkan manajemen akan lebih focus pada kepentingan mereka sendiri yang cenderung akan mengambil kebijakan secara sepihak yang dapat merugikan perusahaan (Hidayanti, 2013).

Konflik antara pemilik perusahaan dengan manajemen juga dapat berdampak kepada permasalahan kepada pemerintah, salah satunya adalah penghindaran pajak. Manajemen yang cenderung ingin meningkatkan keuntungan perusahaan atau laba bersihnya akan menggunakan banyak cara, salah satunya agresivitas pajak dan hal ini terjadi karena pemisahan antara kepemilikan dan manajemen (Desai dan Dharmapala, 2007). Hal ini belum tentu akan disetujui oleh pemilik perusahaan karena pemilik cenderung tidak ingin perusahaan mendapat akibat yang lebih fatal ketika melakukan agresivitas pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung lebih taat dalam hal perpajakan bagi perusahaannya (Chen et al, 2010).

2.2 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan studi yang berkaitan dengan disiplin ilmu social dan humaniora, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, hukum, politik dan studi pembangunan (Susetiawan, 2012). Ide dasar CSR pertama kali diungkapkan oleh Howard R Bowen tahun 1953 yang mengacu pada kewajiban pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan-

tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaannya beroperasi (Susiloadi, 2008). Crowther dan Aras (2008) menjelaskan bahwa CSR merupakan konsep yang dominan dalam sebuah pelaporan bisnis, dan setiap perusahaan mempunyai aturan yang ketat terhadap implementasi CSR dan setiap perusahaan akan membuat laporan tahunan yang termuat laporan mengenai implementasi CSR dari perusahaan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 66 ayat 2 dimana dijelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan di Indonesia harus memuat laporan aktivitas CSR dari perusahaan tersebut. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa CSR merupakan kunci dari keberhasilan sebuah perusahaan.

CSR merupakan strategi dari perusahaan atau organisasi untuk mengembangkan bisnisnya sesuai dengan cara mereka masing-masing dengan memperhatikan nilai etis, ramah dengan masyarakat sekitar dan bermanfaat untuk masyarakat dalam hal pengembangan (Ismail, 2009). Sedangkan menurut Laksmono dan Suhardi (2011) perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Definisi pembangunan berkelanjutan menurut *The World Commission on Environment and Development* yang lebih dikenal dengan *The Brundlant Commission*, adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Pada pertengahan 1990-an gagasan CSR telah dikaitkan dengan “*Corporate Citizenship*” atau keberlanjutan perusahaan dan “*Triple Bottom Line*”. Keberlanjutan perusahaan bergantung pada perilaku perusahaan atas perkembangan berkelanjutan, yaitu kemungkinan aktivitas perusahaan untuk menciptakan peluang untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. ‘*Triple Bottom Line*’ biasanya mengacu pada keseimbangan dan kenaikan yang sama dalam kepentingan ekonomi, social, dan lingkungan dari sebuah bisnis (Bichta, 2003).

Perusahaan pada saat ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada hal menghasilkan banyak uang untuk menguntungkan bagi perusahaan dan pemilik (*single bottom line*) tetapi juga harus memperhatikan aspek lain yang sesuai dengan konsep *triple bottom line* dimana perusahaan harus memperhatikan aspek keuangan, social dan lingkungan. Menurut Harsanti (2011) CSR merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi menganut pada prinsip *single bottom line* yaitu nilai perusahaan hanya berfokus pada kondisi keuangannya saja dan kewajiban ekonomi pada pemegang saham (*shareholder*) melainkan kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan. John Elkington (1997) dalam Birch (2004) menjelaskan bahwa CSR menganut konsep ‘*triple bottom line*’ yang meliputi aspek ekonomi, social, lingkungan yang terkenal dengan istilah “3P” yaitu *people, planet, profit*.

Keberlanjutan perusahaan ditentukan tidak hanya oleh aspek ekonomi melainkan juga aspek social dan lingkungan karena aspek tersebut merupakan

parameter untuk mengetahui apakah ada dampak positif atau negative dari kehadiran perusahaan sebagai komunitas baru terhadap komunitas lokal (masyarakat setempat). Deskripsi tersebut menjadi pengantar mengenai perubahan paradigma tanggung jawab social perusahaan. Saat ini perusahaan semakin menyadari bahwa CSR bukan lagi beban, melainkan bagian dari modal social, dimana keberlanjutan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keuntungan, tetapi juga daya dukung lingkungan alam dan masyarakat (Laksmono dan Suhardi, 2011).

Ada banyak penafsiran dan definisi mengenai CSR. Definisi CSR saat ini mendukung perusahaan harus terlibat dengan *Stakeholder* untuk penciptaan nilai jangka panjang (Yoehana, 2014). Baker (2003) dalam Kakabadse (2005) menjelaskan bahwa CSR adalah bagaimana perusahaan mengendalikan proses bisnisnya agar memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar perusahaan. Wood (1991) mendefinisikan CSR sebagai hubungan bisnis dan masyarakat yang terjalin bukan merupakan hubungan dua entitas yang berbeda.

Definisi dari CSR juga dikemukakan oleh berbagai lembaga internasional, salah satunya yaitu *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) pada tahun 2000 mendefinisikan CSR sebagai:

“Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”.

World Bank sebagai lembaga internasional yang menangani tentang keuangan secara internasional memberikan definisi CSR pada tahun 2013 sebagai berikut:

“The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life in ways that are both good for business and good for development.”

Dari definisi CSR yang dikemukakan oleh dua lembaga internasional tersebut dapat kita simpulkan bahwa CSR adalah komitmen dari perusahaan agar ikut serta dalam pengembangan usahanya sendiri dan pengembangan ekonomi di perusahaan tersebut berada dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan karyawan sebagai individu yang membantu perusahaan menjalankan bisnisnya, dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan dengan memberikan dampak positif bagi kehidupan dan pengembangan masyarakat di sekitar perusahaan. Apabila perusahaan tidak mengimplementasikan CSR dengan baik, selain mereka akan menerima dampak penolakan secara social, mereka juga akan kehilangan loyalitas dari konsumen.

2.3 Corporate Social Responsibility Disclosure

Pengungkapan CSR atau *CSR disclosure* telah menarik banyak penelitian akuntansi selama dua dekade (Guthrie and Parker, 1989; Patten, 1992; Deegan and Gordon, 1996; Deegan and Rankin, 1996; Hackston and Milne, 1996; Brown and Deegan, 1998; Wilmshurst and Frost, 2000; Deegan *et al.*, 2002 dalam Lanis and Richardson (2013). Anwar (2005) berpendapat bahwa perusahaan yang melakukan

praktik CSR dengan baik akan memungkinkan perusahaan untuk mendapat kualitas investor yang baik pula. Dengan hal itu diharapkan perusahaan akan melakukan pengungkapan CSR-nya dengan baik pula (Rouf, 2011).

Guthrie dan Parker (1990) dalam Sayekti dan Wondabio (2007) menjelaskan pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis. Hackston dan Milne (1996) dalam Sembiring (2005) menjelaskan bahwa pengungkapan CSR adalah proses pengkomunikasian dampak social dan ekonomi dari organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Ketentuan mengenai pengungkapan CSR di Indonesia belum terdapat standar khusus yang mengatur hal tersebut hingga saat ini. Sembiring (2005) menjelaskan bahwa berdasarkan adopsi penelitian yang dilakukan Hackson dan Milne (1996), pengungkapan CSR dilakukan dengan metode *checklist* berdasarkan tujuh kriteria yaitu lingkungan, kesehatan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Di dalam penelitian yang dilakukan Hackson dan Milne (1996) terdapat 90 item pengungkapan, tetapi menurut peraturan BAPEPAM nomor VIII G.2 hanya terdapat 78 item yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Dengan menggunakan instrument pengukuran yang mengacu pada instrument yang digunakan oleh Sembiring (2005), diharapkan akan lebih banyak item

pengungkapan yang dapat teridentifikasi di dalam penelitian ini. Sehingga akan lebih dapat menggambarkan bagaimana pengaruh pengungkapan CSR dengan tindakan agresivitas pajak di Indonesia.

2.4 Kepemilikan Mayoritas

Kepemilikan saham oleh pihak mayoritas baik dari perusahaan non public dan keluarga di dalam perusahaan di Indonesia masih menjadi hal yang umum karena dominannya hal tersebut di dalam negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Arifin (2003) di dalam negara berkembang, kepemilikan saham masih didominasi oleh kepemilikan keluarga termasuk di Indonesia. Fama dan Jensen (1983) dalam Hidayanti (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga lebih efisien daripada perusahaan yang dimiliki publik karena biaya pengawasan yang dikeluarkan atau *monitoring cost* nya lebih kecil. Sedangkan menurut Maury (2006) bahwa tingkat profitabilitas di dalam perusahaan yang dimiliki mayoritas oleh keluarga akan lebih dapat meningkat dibandingkan perusahaan non-keluarga. Miller, Miller, Lester dan Canella (2007) menjelaskan bahwa bisnis atau perusahaan non keluarga dapat lebih memaksimalkan kegunaan perusahaan secara lebih baik dibandingkan dengan perusahaan atau bisnis dengan kepemilikan keluarga.

Sebuah perusahaan akan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga jika dalam bisnisnya, pelaku bisnis masih memiliki garis keluarga antar satu dengan yang lainnya. Sedangkan perusahaan akan dikategorikan sebagai perusahaan dengan kepemilikan mayoritas oleh perusahaan non public jika dalam bisnisnya, kepemilikan

saham mayoritas dimiliki oleh perusahaan non public yang kebanyakan dimiliki oleh perorangan. Bisnis keluarga juga didefinisikan oleh beberapa peneliti yang diantaranya Hoover (2000) menjelaskan bahwa bisnis keluarga memiliki kekuatan utama yaitu hubungan kekerabatan dan komunikasi yang baik untuk menjalankan bisnis keluarga. Dan menurut Susanto et al (2007) suatu organisasi dinamakan sebuah perusahaan keluarga apabila dalam suatu perusahaan terdapat dua generasi yang berkaitan secara keluarga dan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dalam sebuah usaha keluarga, anggota keluarga secara ekonomis tergantung pada yang lain, dan bisnisnya secara strategis dihubungkan pada kualitas hubungan keluarga (Hidayanti, 2013). Perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah kelompok (negara, keluarga dan institusi) memiliki masalah keagenan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang dikendalikan oleh publik atau perusahaan tanpa pemegang saham pengendali (Prasetyo, 2009).

Penelitian ini menggunakan definisi mayoritas dari keluarga yang digunakan oleh Arifin (2003), yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat). Yang bukan perusahaan publik, negara institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Dalam penelitian ini kepemilikan mayoritas oleh perusahaan non public dihitung dari kepemilikan individu, non perusahaan publik, non BUMN, non institusi keuangan, perusahaan afiliasi, dan perusahaan asing yang merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan tersebut.

2.5 Agresivitas Pajak

Tindakan agresivitas pajak, yang mana tindakan tersebut dilakukan dengan cara meminimalisasi jumlah kena pajak yang didapat perusahaan, merupakan hal yang sering terjadi pada perusahaan-perusahaan besar saat ini. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku baik di masyarakat maupun dalam pemerintahan. Pemerintah, sebagai penerima pajak, akan dirugikan dengan tindakan tersebut karena dapat mengurangi pendapatan pemerintah untuk pembangunan negara. Bagi masyarakat, dampak yang akan didapatkan adalah mereka tidak mendapatkan fasilitas yang memadai dan menunjang pembangunan yang didapat dari pemerintah atas tindakan tersebut. Friese et al (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa pembayaran pajak oleh perusahaan seharusnya memiliki implikasi bagi masyarakat dan social karena membantu dalam mendanai penyediaan barang public di masyarakat, seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat, transportasi umum, dan penegakan hukum.

Pada pertengahan antara tahun 1990 sampai 2000, banyak sekali muncul kasus agresivitas pajak yang terindikasi dalam laporan keuangan yang agresiv (Lennox, Lisowsky, dan Pittman, 2012). Hlaing (2012) menjelaskan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Hanlon dan Slemrod (2008) berpendapat bahwa dalam rangka meningkatkan nilai dari perusahaan, pemilik saham dan pemilik perusahaan akan meminimalisasi pajak perusahaan ditandai dengan

tingkat transparansi yang lebih rendah. Sedangkan menurut Steijvers dan Niskanen (2011) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tindakan merendahkan tingkat pajak penghasilan yang tertagih melalui kegiatan manajemen pajak baik secara legal maupun illegal maupun keduanya. Sedangkan menurut Hite dan McGill (1992) dalam Hartadinata dan Shauki (2011) menjelaskan bahwa agresivitas pajak sebagai tindakan perusahaan menjalankan kebijakan tertentu dengan harapan tidak akan ter-audit oleh badan yang terotorisasi dan perusahaan menanggung beberapa resiko yang terkait dengan tindakan tersebut. Hidayat dan Jaenudi (2006) dalam Yoehana (2013) menyatakan bahwa beban pajak yang dipikul oleh subjek pajak badan, memerlukan perencanaan yang baik, oleh karena itu strategi perpajakan menjadi mutlak diperlukan untuk mencapai perusahaan yang optimal. Strategi dan perencanaan pajak yang baik dan tentu saja harus legal, akan mampu mendorong perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain.

Cara mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dengan cara menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa ETR merupakan proksi yang banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi ETR dinilai menjadi indikator tingkat agresivitas pajak jika nilainya mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak dari perusahaan tersebut. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil nominalnya dibandingkan penghasilan sebelum pajak.

2.6 Variabel Kontrol.

2.6.1 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu (Munawir, 2004). Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi *Return On Assets* (ROA). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi ROA yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. ROA dan ETR memiliki hubungan yang positif, yang mana berarti semakin meningkat ROA sebuah perusahaan maka meningkat pula tingkat ETR, begitupun sebaliknya. Gupta dan Newberry (1997) dalam Janssen dan Buijink (2000) menjelaskan bahwa seiring dampak dari reformasi perpajakan yang menurunkan tarif pajak maka ROA dan ETR memiliki hubungan negative.

2.6.2 Leverage

Leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana dalam penggunaan tersebut, perusahaan harus membayar biaya tetap atau menutup beban tetap (Riyanto, 1995). Perusahaan yang memiliki nilai leverage tinggi berarti sangat bergantung kepada pinjam ke pihak luar untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan yang memiliki leverage rendah berarti membiayai asetnya dengan modal sendiri. *Leverage* dihitung dari total hutang jangka panjang dibagi

dengan total asset yang tujuannya adalah menggambarkan struktur modal perusahaan dan keputusan pembiayaan perusahaan.

2.6.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan karakteristik yang sangat penting dari perusahaan yang dijadikan *variable control* dalam penelitian ini. Octaviana (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang besar tentunya akan menjaga *image* dari perusahaan tersebut dengan cara mengungkapkan informasi yang akurat dan relevan sehingga mendapatkan kesan yang baik dari masyarakat.

Penelitian mengenai CSR dan agresivitas pajak yang menggunakan ukuran perusahaan sebagai *variable control* telah digunakan oleh beberapa peneliti diantaranya Clarkson et al (2008), Cho et al (2010), Lanis dan Richardson (2012). Sedangkan penelitian mengenai *family firm* dengan agresivitas pajak yang menggunakan ukuran perusahaan sebagai *variable control* diantaranya Hidayanti (2013) dan Martinez dan Ramalho (2014).

2.6.4 Market to Book Ratio

Market to Book Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui peluang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Pertumbuhan perusahaan akan berdampak pada kepemilikan informasi yang lebih besar diantara manajemen, investor dan *agency cost* (Smith dan Watts, 1992; Gaver dan Gaver, 1993) dalam Lanis dan Richardson (2013). Manzon dan Plesko (2002) menjelaskan

bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan juga perlu dikontrol karena perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan akan lebih cenderung berinvestasi pada *tax-favored assets*.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Agresivitas Pajak telah banyak dilakukan di Indonesia dan di negara lain, dengan berbagai inovasi dan perubahan baik dalam metode penghitungan maupun sampel yang digunakan. Tetapi penelitian mengenai Kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak belum banyak dilakukan di Indonesia, walaupun di lain negara sudah diteliti oleh beberapa peneliti. Tetapi penelitian yang mengaitkan antara CSR dan Kepemilikan Keluarga dengan Agresivitas Pajak belum banyak dilakukan baik di Indonesia ataupun di negara lain.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai CSR dan kaitannya dengan agresivitas pajak. Watson (2012) melakukan penelitian dengan judul “*Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance and Tax Aggressiveness*”. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat hubungan negative antara pengungkapan CSR dengan *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan *Book Effective Tax Rates* (ETR), dan dalam menghitung tingkat *Tax Aggressiveness* menggunakan *Unrecognized Tax Benefits* (UTB). *Tax Avoidance* dihitung dengan GAAP ETR karena memberikan informasi mengenai pajak obligasi dari perusahaan tersebut dan mengukur *Tax*

Aggressiveness menggunakan data dari FASB Interpretation No. 48 (FIN 48, now ASC 740-10) yang mengungkapkan mengenai *Unrecognized Tax Benefits*.

Penelitian yang dilakukan oleh Tao Zeng (2012) berjudul “*Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness*” menggunakan variable dependen adalah CSR dan variable independen adalah agresivitas pajak. Hasil dari penelitian tersebut, dimana menggunakan alat uji statistic yaitu analisis regresi, menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan tanggung jawab social secara baik, dimana hasil tersebut menjadi bukti empiris atas penelitian ini.

Lanis dan Richardson (2012) melakukan penelitian mengenai CSR dan agresivitas pajak yang berjudul “*Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis*.” Penelitian tersebut menggunakan variable independen yaitu CSR yang menggunakan proksi CSR Disclosure menggunakan 52 item dan variable dependen dalam penelitian tersebut adalah agresivitas pajak yang dihitung menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Hasil dari penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin kecil tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, atau berhubungan negatif. Penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson ini menggunakan sampel pada perusahaan yang berada di Australia yang terdaftar dalam Aspect-Hunley Financial Database periode 2008-2009 dengan menggunakan analisis regresi tobit.

Penelitian mengenai Kepemilikan Keluarga dan Agresivitas pajak juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Chen, Chen, Cheng dan Shelvin (2008) dengan judul “*Are Family Firms more Tax Aggressive Than Non-Family Firms?*”. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara perusahaan dengan kepemilikan keluarga dengan perusahaan bukan kepemilikan keluarga, manakah yang lebih mempunyai tingkat agresivitas yang tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan oleh keluarga cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga, *Ceteris Paribus*. Penelitian ini menggunakan variable independen perusahaan keluarga dan perusahaan non-keluarga, dan menggunakan variable dependen agresivitas pajak.

Penelitian mengenai Perusahaan dengan kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak juga telah diteliti oleh Martinez dan Ramalho (2014) dengan judul “*Family Firms and Tax Aggressiveness in Brazil*”. Penelitian ini menggunakan variable independen perusahaan keluarga, dengan kriteria sebagai berikut: (1) Pengendali, diukur menggunakan presentase kepemilikan saham biasa; (2) Kepemilikan, diukur dengan anggota keluarga paling tidak memiliki saham biasa pada perusahaan sebesar 5%; (3) Manajemen, diukur melalui kedudukan anggota keluarga dalam Dewan Direksi perusahaan. Sedangkan variable dependen menggunakan agresivitas pajak, dengan proksi *Effective Tax Rates* (ETR) dan *Book Tax Difference* (BTD). Penelitian ini juga menggunakan variable control diantaranya ROA, *Leverage* (LEV), *Plant Property and Equipment* (PPE), ukuran perusahaan (SIZE) dan *Market to Book Ratio*

(MB). Sampel dari penelitian ini menggunakan perusahaan yang berada di Brasil yang terdaftar pada BMF dan Bovespa dari tahun 2001-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan keluarga di Brasil lebih agresiv dalam melakukan perencanaan pajak dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Hasil ini terbalik dengan hasil penelitian Chen et al (2008) dan menimbulkan berbagai spekulasi atas hasil penelitian sehingga perlu dilakukan lebih lanjut lagi penelitian mengenai perusahaan dengan kepemilikan keluarga dengan agresivitas pajak.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian | Peneliti | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|---|-----------------|--|---|
| 1. | <i>Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, and Tax Aggressiveness</i> | Watson (2012) | Variabel dependen: agresivitas pajak (ETR) Variabel independen : CSR. Menggunakan analisis regresi OLS | Memberikan bukti empiris bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. |
| 2. | <i>Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness</i> | Tao Zeng (2012) | Variabel dependen: CSR Variabel independen: agresivitas | Memberikan bukti empiris bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan agresivitas pajak |

| | | | | |
|----|--|--------------------------------------|---|---|
| | | | pajak Menggunakan analisis regresi | cenderung kurang tertarik untuk bertanggung jawab melakukan CSR |
| 3. | <i>Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis</i> | Lanis dan Richardson (2012) | Variabel dependen: agresivitas pajak (ETR) Variabel independen: CSR Menggunakan analisis regresi Tobit | Memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan |
| 4. | <i>Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms?</i> | Chen, Chen, Cheng dan Shelvin (2008) | Variabel Dependen: agresivitas pajak (ETR). Variabel Independen: Perusahaan keluarga dan Perusahaan non-keluarga | Perusahaan dengan proporsi kepemilikan oleh keluarga cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga, <i>Ceteris Paribus</i> |
| 5. | <i>Family Firms and Tax Aggressiveness in Brazil</i> | Martinez dan Ramalho (2014) | Variabel Dependen: agresivitas pajak dengan proksi ETR dan BTD. Variabel | Sampel dari penelitian ini menggunakan perusahaan yang berada di Brasil yang terdaftar pada BMF dan |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | Independen: perusahaan keluarga dengan klasifikasi kriteria: pengendalian, kepemilikan, manajerial. Variabel Kontrol: ROA, LEV, PPE, SIZE dan MB. | Bovespa dari tahun 2001-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan keluarga di Brasil lebih agresiv dalam melakukan perencanaan pajak dibandingkan dengan perusahaan non- keluarga. |
|--|--|--|---|---|

Penelitian ini berfokus pada pengaitan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Kepemilikan Mayoritas (baik dimiliki oleh perusahaan non public dan keluarga) dan Agresivitas Pajak. Penelitian mengenai agresivitas pajak, yang mempunyai istilah identic lainnya seperti penghindaran pajak, manajemen pajak dan sebagainya, telah banyak dilakukan oleh para peneliti baik di Indonesia dan di negara lain. Sedangkan penelitian mengenai kepemilikan mayoritas dan agresivitas pajak masih belum banyak dilakukan di Indonesia karena merupakan isu yang baru dalam dunia penghindaran pajak di Indonesia. Atas dasar tersebut, peneliti ingin mengaitkan antara CSR dan kepemilikan mayoritas dengan agresivitas pajak di Indonesia.

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan variable independen CSR dan Kepemilikan Mayoritas, sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Penelitian ini juga menggunakan variable control diantaranya Profitabilitas (ROA), *Leverage* (LEV), Ukuran perusahaan (SIZE), dan *Market to Book Ratio* (MB).

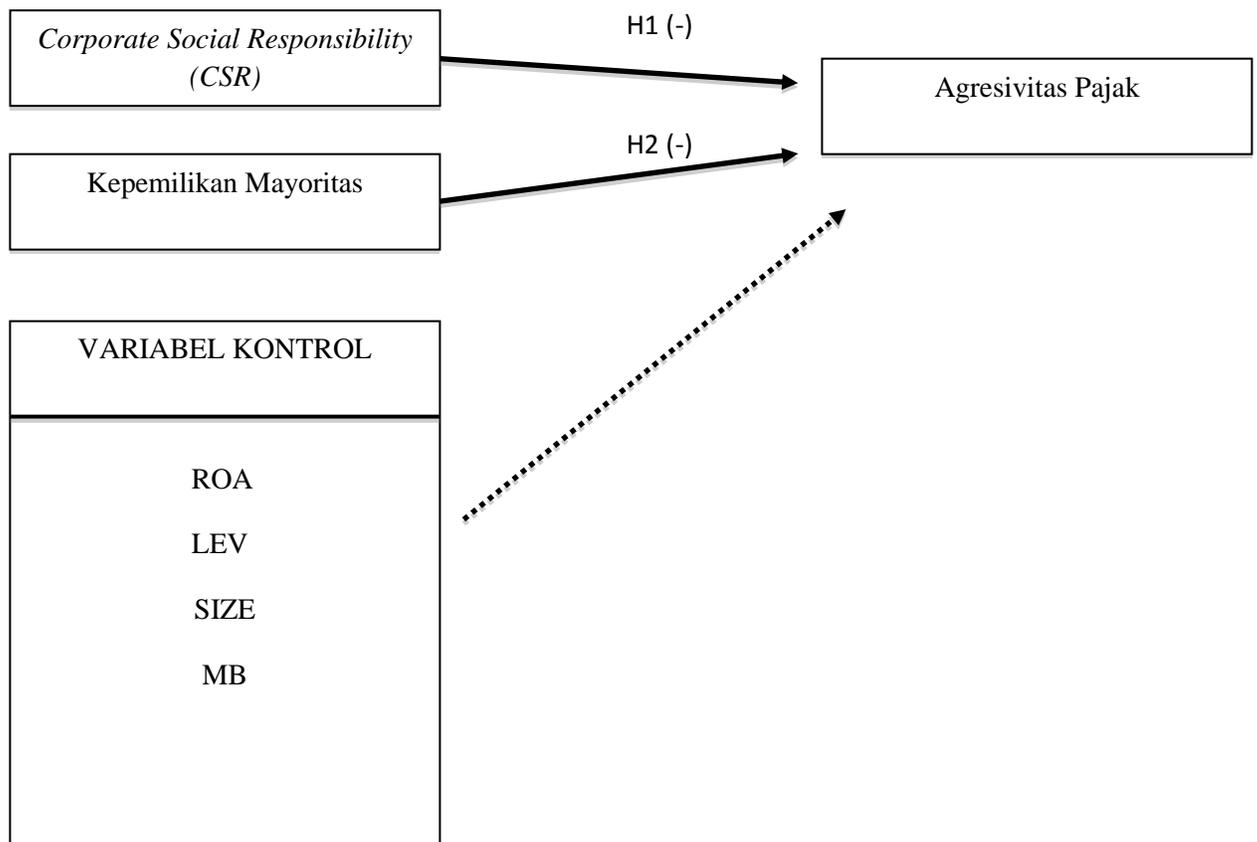
Variable independen ditunjukkan dalam kolom sebelah kiri dengan garis panah tersambung mengarah pada kolom variable independen sebelah kanan. Pada variable independen *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara negative terhadap variable dependen yaitu agresivitas pajak, dan dijadikan sebagai hipotesis 1. Hal tersebut ditunjukkan pada keterangan H1 (-) yang berada diatas garis yang berarti hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak adalah negative dan sebagai hipotesis pertama. Pada kolom variable independen yang kedua, yaitu variable kepemilikan mayoritas, berhubungan langsung pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak, dengan ditandai dengan garis menyambung. Hubungan antara variable tersebut dengan variable dependen adalah negative dan dijadikan sebagai hipotesis kedua. Sebagaimana ditunjukkan dengan keterangan H2 (-) bahwa variable tersebut berhubungan negative dan merupakan hipotesis kedua.

Pada variable control, terdapat variable ROA, *Leverage* (LEV), Ukuran perusahaan (SIZE), dan *Market Book Ratio* (MB) yang dijadikan dalam satu kolom sebelah kiri dan diberi tanda garis terputus mengarah ke variable independen yang

berarti bahwa variable tersebut mempengaruhi secara tidak langsung. Kerangka pemikiran ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.9 Pengembangan Hipotesis

Pajak di Indonesia adalah factor penting dalam pendanaan untuk melaksanakan semua kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan di Indonesia.

Setiap warga negara maupun sebuah organisasi yang menjalankan bisnis, wajib memiliki NPWP jika mereka telah memenuhi syarat. Mereka yang telah memiliki NPWP disebut sebagai wajib pajak dan diharuskan membayarkan pajak tertagih sesuai dengan aturan yang berlaku. Perusahaan di Indonesia, disebut sebagai wajib pajak badan. Mereka diharuskan menyetor sebagian laba bersihnya untuk membayar pajak. Dengan membayar pajak sesuai dengan yang tertagih dan tepat waktu, berarti ikut serta dalam pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat banyak. Pembayaran pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya persepektif masyarakat. Harari et al (2012) menjelaskan bahwa pajak dapat dikatakan sebagai dividen yang dibayarkan perusahaan kepada masyarakat, sebagai konsekuensi dan imbalan atas segala sumber daya yang telah digunakan oleh perusahaan.

Sesuai dengan kaidah teori legitimasi, dimana perusahaan berusaha meyakinkan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan aturan-aturan dan norma yang berlaku, atau perusahaan berusaha melegitimasi tindakannya agar dapat diterima di dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika perusahaan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak, walaupun tidak melanggar hukum, tetapi hal tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh perusahaan, dan hal itu dapat mengancam keberadaan perusahaan karena perusahaan dapat dianggap sebagai parasit di dalam kehidupan masyarakat. Selain dengan masyarakat, hubungan baik perusahaan juga harus diterapkan pada hubungan dengan pemerintah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar pajak sesuai dengan nominal yang tertagih dan tepat waktu dapat membina hubungan baik perusahaan dengan pemerintah.

Sesuai dengan kaidah dari teori *Stakeholder*, bahwa perusahaan harus menerapkan dengan baik tanggung jawab sosialnya agar mendapat manfaat yang baik dari konsumen, karyawan, pejabat pemerintah dan pihak lain yang terkena dampak dari keputusan bisnis dari perusahaan. Teori ini juga memaksa manajemen untuk tidak hanya mempertimbangkan kesepakatan dengan pemegang saham melainkan juga pihak lain yang terlibat atau terkena dampak dari kegiatan perusahaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Jensen (2001) bahwa dalam teori *Stakeholder* manajemen perlu membuat keputusan yang mempertimbangkan kepentingan selain stakeholder, seperti karyawan, pelanggan, pejabat pemerintah. Atas dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan perlu menerapkan CSR dengan baik sebagai bentuk pertanggung jawaban social terhadap *Stakeholder*.

Avi-Yonah (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa pajak perusahaan hanya dapat dikaitkan dengan CSR apabila pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan memang memiliki implikasi untuk masyarakat luas. Hal ini berarti, penerapan CSR dan pengaitannya dengan pembayaran pajak harus berdampak pada masyarakat secara masiv. Apabila pembayaran pajak perusahaan hanya dianggap sebagai sebuah transaksi bisnis dan menjadi biaya bagi perusahaan, mungkin tujuan perusahaan tersebut adalah untuk meminimalkan jumlah pajak terutang sebanyak mungkin (Yoehana, 2013). Sebagai wujud perusahaan dalam menerapkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, seharusnya perusahaan tidak akan melakukan tindakan agresivitas pajak baik secara legal maupun illegal. Christensen dan Murphy (2004); Ostas (2004); dan Rose (2007) dalam Lanis dan

Richardson (2012) menyatakan bahwa dengan mengambil sikap pasif terhadap perpajakan, perusahaan dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat dan dapat mempertahankan kedudukan yang baik terhadap otoritas pajak dengan cara mematuhi dan semangat dalam mengikuti hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini karena apabila perusahaan yang menerapkan CSR dan melakukan tindakan agresivitas pajak, maka perusahaan akan kehilangan nama baik di mata *stakeholder*, masyarakat dan pemerintah, serta akan menurunkan nilai dan dampak positif dari CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Sebagaimana ditunjukkan pada penelitian sebelumnya yang telah disingkat pada table 2.1, Watson (2012), Tao Zeng (2012), Lanis dan Richardson (2012) berpendapat pada penelitiannya bahwa perusahaan yang tidak bertanggung jawab social secara baik sesuai dengan ketentuan akan melakukan tindakan agresivitas pajak lebih tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan yang melakukan agresivitas pajak kurang tertarik untuk menerapkan CSR secara baik di perusahaan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tindakan manajemen yang tidak ingin menaati pajak karena mereka ingin memperoleh laba bersih yang lebih tinggi dan menganggap bahwa pajak adalah biaya bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan secara signifikan. Seperti diketahui sebelumnya bahwa kaidah dari CSR tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi bertanggung jawab pula kepada

pemerintah, dengan taat membayar pajak dan sesuai dengan yang tertagih untuk perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H1: CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan saham dengan mayoritas pemilik perusahaan non public dan keluarga, masih dominan terjadi di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia butuh banyak investor untuk menumbuhkan perekonomian secara makro. Besarnya keuntungan dan kerugian yang didapatkan perusahaan dengan kepemilikan mayoritas dan perusahaan non-mayoritas, akan berpengaruh pada seberapa tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan kepemilikan mayoritas dengan perusahaan non-mayoritas. Perusahaan dengan kepemilikan mayoritas biasanya lebih memperhatikan reputasi dan tingkat *safety* dari segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, karena manajemen yang sekaligus pengendali perusahaan tersebut lebih memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki manajerial dari non-pemilik mayoritas. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan mayoritas akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan, termasuk masalah perpajakan karena dampaknya akan langsung dirasakan pemegang saham mayoritas sebagai pemilik sekaligus pembuat kebijakan-kebijakan perusahaan.

Sesuai dengan teori yang dipakai yaitu teori keagenan, bahwa perusahaan di waktu sekarang lebih banyak memisahkan antara kepemilikan dan manajerialnya. Hal tersebut dapat menimbulkan efek atau akibat yang negative terhadap perusahaan yaitu

konflik keagenan atau *Agency Conflict* yang melibatkan pemilik perusahaan sebagai *Principal* dan manajemen sebagai *Agent*. Hal tersebut juga akan berdampak pada ketaatan dalam membayar pajak karena manajemen ingin memperoleh laba bersih yang besar dengan cara penghindaran pajak, namun perusahaan yang cenderung dengan kepemilikan sebagian besar dimiliki oleh pihak mayoritas akan lebih taat dalam membayar pajak karena pemilik perusahaan lebih rela membayar pajak lebih besar atau sesuai dengan yang tertagih, daripada harus membayar denda dan mendapat sanksi yang dapat berakibat buruk terhadap keberlangsungan usaha perusahaan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Martinez dan Ramalho (2014), menggunakan *variable independen* kepemilikan keluarga dan *variable dependen* agresivitas pajak. Pada penelitian tersebut ditemukan hasil yang berbeda dengan penelitian lainnya yaitu perusahaan dengan kepemilikan keluarga justru cenderung melakukan agresivitas pajak yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh klasifikasi perusahaan keluarga pada penelitian tersebut cenderung mengklasifikasikan pada kriteria yang berhubungan dengan manajemen dari perusahaan sampel, dan timbul sebuah konflik keagenan yang menyebabkan agresivitas pajak lebih tinggi dilakukan oleh perusahaan keluarga pada sampel tersebut. Perbedaan hasil penelitian tersebut juga disebabkan karena perbedaan literature di Brazil mengenai akuntansi yang menjelaskan tentang kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak dibandingkan dengan negara lain.

Chen, Chen, Cheng dan Shelvin (2008) menyatakan bahwa manfaat dan biaya dari tindakan agresivitas pajak akan lebih tinggi dirasakan oleh perusahaan keluarga. Konflik keagenan (*Agency Conflict*) di dalam perusahaan keluarga juga memiliki tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga, karena pemilik saham minoritas tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan dan biasanya mereka akan mengikuti pada kebijakan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas. Sehingga pemilik saham minoritas akan lebih patuh dan taat kepada pemilik saham mayoritas (Arifin, 2003).

Penelitian dari Chen, Chen, Cheng dan Shelvin (2008) juga menyatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki tingkat agresivitas pajak lebih rendah dari perusahaan non-keluarga karena perusahaan dengan kepemilikan mayoritas dari keluarga, rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda perpajakan dan menghadapi hilangnya reputasi dan eksistensi sebagai akibat dari audit yang dilaksanakan oleh fiskus pajak, selaku badan yang menangani permasalahan perpajakan di Indonesia. Dengan adanya resiko membayar denda dan kehilangan reputasi dan eksistensi tersebut, perusahaan keluarga akan lebih mempertimbangkan apakah akan melakukan tindakan agresivitas pajak atau tidak. Penyusunan hipotesis kedua mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chen et al (2008) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung memiliki tingkat yang lebih rendah dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Oleh karena itu akan diajukan hipotesis yang kedua yaitu:

H2: Kepemilikan Mayoritas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun kedua-duanya. Penelitian ini mengukur agresivitas pajak dalam beberapa proksi pengukuran. Adapun yang menjadi proksi utama dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Lanis dan Richardson (2011) adalah *Effective Tax rates 1* (ETR1) yang dihitung dari:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

ETR1 menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. ETR1 diukur dengan menggunakan proksi model Lanis dan Richardson (2012)

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Corporate Social Responsibility

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* yang diproksikan ke dalam pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan *check list* yang mengacu pada indikator pengungkapan yang digunakan oleh Sembiring (2005) karena lebih sesuai dengan keadaan perusahaan di Indonesia, dimana pengungkapan CSR-nya masih bersifat umum dan belum rinci. Indikator ini terdiri atas tujuh kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan manufaktur adalah sebanyak 78 item yang terdiri atas kategori lingkungan (13 item), kategori energi (7 item), kategori kesehatan dan keselamatan tenaga kerja (8 item), kategori lain-lain tenaga kerja (29 item), kategori produk (10 item), kategori keterlibatan masyarakat (9 item), dan kategori umum (2 item).

Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada *check list* dengan item yang diungkapkan perusahaan. Apabila item y diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item y tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada *check list*. Setelah mengidentifikasi item yang diungkapkan oleh perusahaan di dalam laporan tahunan, serta mencocokkannya pada *check list*, hasil pengungkapan item yang diperoleh dari

setiap perusahaan dihitung indeksnya dengan proksi CSRI. Adapun rumus untuk menghitung CSRI sebagai berikut:

$$TCSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

CSRI_i : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i.

$\sum X_{yi}$: nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan.

n_i : jumlah item untuk perusahaan i, $n_i \leq 78$.

3.1.2.2 Kepemilikan Mayoritas

Arifin (2003) menyatakan bahwa semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat), keluarga adalah seseorang yang berhubungan darah atau karena pernikahan. Sedangkan perusahaan dengan kepemilikan non perusahaan public dinyatakan dalam proporsi kepemilikan saham melebihi 50% di dalam modal saham di catatan atas laporan keuangan. Dalam penelitian ini kepemilikan mayoritas diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 jika proporsi kepemilikan mayoritas baik oleh perusahaan non public dan keluarga > 50%, dan bernilai 0 jika sebaliknya. Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan yang bukan perusahaan publik, negara institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Dalam penelitian ini kepemilikan mayoritas dihitung dari kepemilikan individu anggota keluarga (non direksi dan

komisaris), non perusahaan publik, non BUMN, non institusi keuangan, perusahaan afiliasi, dan perusahaan asing yang merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan tersebut.

Pengukuran kepemilikan mayoritas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepemilikan langsung adalah kepemilikan dari keluarga yang juga menjadi pihak manajemen, sedangkan tidak langsung adalah kepemilikan seseorang melalui perusahaan non public yang dimiliki seseorang tersebut melalui kepemilikan pada proporsi saham.

3.1.3 Variabel Kontrol

3.1.3.1 Profitabilitas Perusahaan

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Penelitian ini menggunakan ROA sebagai proksi untuk mengukur profitabilitas. ROA diukur dengan menggunakan proksi model Lanis dan Richardson (2012) yaitu:

$$ROA = \frac{\text{pendapatan sebelum pajak (EBIT)}}{\text{total aset}}$$

3.1.3.2 Leverage

Leverage menggambarkan proporsi hutang jangka panjang terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keputusan pendanaan

yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Leverage* menurut Lanis dan Richardson (2012) dihitung dari:

$$LEV = \frac{\text{Total Hutang jangka panjang}}{\text{Total aset}}$$

3.1.3.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat melalui total aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan menurut Lanis dan Richardson (2012) dapat diukur dengan logaritma natural total aset dengan rumus sebagai berikut:

$$Size = Ln \text{ total aset}$$

3.1.3.4 Market to Book Ratio

Market to Book Ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan perusahaan di masa depan. Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh investasi di masa depan. Menurut Lanis dan Richardson (2012), *Market to Book Ratio* dapat diukur dengan:

$$MTB = \frac{\text{Nilai pasar}}{\text{nilai buku}}$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai populasi perusahaan adalah karena:

1. Permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia,
2. Untuk menghindari bias yang disebabkan oleh efek industri, dan
3. Sektor manufaktur memiliki jumlah terbesar dibandingkan dengan sektor yang lainnya.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjek peneliti, sampel dipilih berdasarkan pada kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif.

Kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel secara *purposive sampling* dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Yoehana (2013) yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan mempublikasikan *annual report* dan data keuangan yang lengkap yang dibutuhkan selama tahun 2011-2013. Alasan memilih tahun 2011-2013

sebagai sampel penelitian karena tarif perpajakan yang baru berlaku pada tahun 2010. Penelitian ini dimulai pada tahun 2014, sehingga data yang sudah tersedia secara lengkap adalah data laporan keuangan dan *annual report* perusahaan sampai tahun 2013. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur selama tahun 2011 dan 2013.

2. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian. Hal ini karena akan menyebabkan nilai ETR menjadi negatif sehingga akan menyulitkan penghitungan.
3. Perusahaan yang memiliki ETR antara 0-1 sehingga dapat mempermudah dalam penghitungan, dimana semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak.
4. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember.
5. Perusahaan yang menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporannya.
6. Perusahaan yang memiliki nilai aset bersih positif selama tahun penelitian

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan merupakan jenis data sekunder. Penelitian

ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang listing di BEI selama tahun 2011 dan tahun 2013, yang didokumentasikan dalam www.idx.co.id serta sumber lain yang relevan seperti (*Indonesia Capital Market Directory*) ICMD.

Data yang diambil berupa data *cross section*, artinya bahwa pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber informasi perusahaan dari Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2013.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Metode studi pustaka

Yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai literature pustaka seperti buku-buku, jurnal, masalah, literatur, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Pencatatan data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2006).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik yang dilakukan ada 4 yaitu: uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji normalitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Asumsi normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah yang berdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006).

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis:

H₀ : data residual berdistribusi normal

H_A : data residual tidak berdistribusi normal

Level of Significant yang digunakan adalah 0,05. Data berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) hasil perhitungan dalam komputer lebih dari 0,05

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolonieritas adalah situasi adanya variabel-variabel bebas diantara satu sama lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

1. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 0,95), maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
3. Melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk melihat Multikolonieritas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2006).

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan

pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini akan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yang mensyaratkan adanya konstanta (intercept) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen (Ghozali, 2006). Mekanisme pengujian Durbin Watson menurut Gujarati (2003) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis :

Ho : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

Ha : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

2. Menentukan nilai d hitung (Durbin-Watson).

3. Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel independen, menentukan nilai batas atas (du) dan batas bawah (dl) dalam tabel.

4. Mengambil keputusan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $0 < d < dl$, Ho ditolak berarti terdapat autokorelasi positif.
- b. Jika $dl \leq d \leq du$, daerah tanpa keputusan (gray area), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan.
- c. Jika $du < d < 4 - du$, Ho tidak ditolak berarti tidak ada autokorelasi.
- d. Jika $4 - du \leq d \leq 4 - dl$, daerah tanpa keputusan (gray area), berarti uji tidak

menghasilkan kesimpulan.

e. Jika $4 - d_1 < d < 4$, H_0 ditolak berarti terdapat autokorelasi positif.

3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (homokedastisitas) dimana *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Ada beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas dalam *variance error terms* untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (diagram scatterplot) dengan dasar analisis yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis *multiple regression* (regresi berganda). Pengujian hipotesis dilakukan sebanyak dua kali

karena terdapat dua proksi untuk mengukur agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Adapun yang menjadi proksi utama variabel dependen adalah ETR1,.
Persamaan *multiple regression* untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Model Regresi:

$$\text{TAGit} = \alpha_0 + \beta_1 \text{CSRIit} + \beta_2 \text{FAMit} + \beta_3 \text{ROAit} + \beta_4 \text{LEVit} + \beta_5 \text{SIZEit} + \beta_6 \text{MBit} + e$$

Keterangan:

TAGit = agresivitas pajak perusahaan *i* tahun ke-*t* yang diukur menggunakan proksi: ETR1, dan BTB

α_0 = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi

CSRIit = Pengungkapan item CSR perusahaan *i* tahun ke-*t*

FAMit = Kepemilikan keluarga perusahaan *I* tahun ke-*t*

ROAit = Tingkat pengembalian aset perusahaan *i* tahun ke-*t*

LEVit = Proporsi hutang jangka panjang terhadap aset perusahaan *i* tahun ke-*t*

SIZEit = Proporsi ukuran perusahaan terhadap total aset tetap perusahaan *i* tahun ke-*t*

MBit = Proporsi *Market to Book Ratio* terhadap aset perusahaan *I* tahun ke-*t*

e = error (kesalahan pengganggu)

3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model. Karena dalam penelitian ini menggunakan banyak variabel independen, maka nilai *Adjusted R2* lebih tepat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Langkah-langkah untuk pengujian tersebut yaitu:

1. Menentukan Hipotesis

H_0 : FCF = MTBV = CFR = CR tidak berpengaruh terhadap DPR, atau

Ho : $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_k = 0$

Ha : FCF = MTBV = CFR = CR berpengaruh terhadap DPR, atau

Ha : $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_k \neq 0$

2. Menetapkan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05.

3. Menghitung nilai sig-F dengan menggunakan software SPSS 17.

4. Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian yaitu: a.

Ho ditolak, Ha diterima yaitu bila nilai sig-F kurang dari tingkat signifikan 0,05 berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau, Ho tidak ditolak, Ha tidak diterima yaitu bila nilai sig-F lebih dari tingkat signifikan 0,05 berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Langkah-langkah untuk pengujian tersebut yaitu:

1. Menentukan Hipotesis

Ho : $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$

Ha : $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$

2. Menetapkan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05.
3. Menghitung nilai signifikan dengan menggunakan software SPSS 17.
4. Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian yaitu:
 - a. Ho ditolak, Ha diterima yaitu bila nilai signifikan kurang dari tingkat signifikan 0,05 berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen atau,
 - b. Ho tidak ditolak, Ha tidak diterima yaitu bila nilai signifikan lebih dari tingkat signifikan 0,05 berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.